



**EVALUASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC* LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Kasus di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh

**MELYSE NASYA ALFITA**

**NPM 21901091095**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Melyse Nasya Alfita, 2022, NPM 21901091095, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan *Electronic* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu), Dosen Pembimbing I: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M, Dosen Pembimbing II: Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si

---

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan evaluasi kebijakan *e-lppd* pada dunia pemerintahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu. Hadirnya kebijakan *e-lppd* dalam dunia pemerintahan di Indonesia menjadi satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan munculnya *e-lppd* yang dilandasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Elektronik, proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional atau dengan datang langsung ke kantor pemerintah.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasannya, dalam pelaksanaan *e-lppd*, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses penyusunan laporan secara elektronik yang belum maksimal dikarenakan pergeseran pejabat disaat pelantikan menjadikan pejabat ini tidak tahu sehingga memulai dari nol lagi. Dan mengenai apakah kebijakan ini sudah berjalan secara efektif seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, transparan dan akuntabel, kebijakan *e-lppd* ini mampu memenuhi sesuai peraturan yang ada.

Melalui proses evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa rekomendasi dan saran yang dapat peneliti berikan yakni dengan optimalisasi proses sosialisasi pada SKPD Kota Batu sehingga kehadiran *e-lppd* ini lebih dikenal dan dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh SKPD Kota Batu. Selain itu optimalisasi pelatihan pada pengisian laporan juga menjadi salah satu saran agar para SKPD Kota Batu tidak kesulitan dalam melakukan pengisian.

**Kata Kunci:** Evaluasi, *E-Lppd*, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

## SUMMARY

Melyse Nasya Alfita, 2022, NPM 21901091095, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Electronic Policy Evaluation of Local Government Administration Reports (Case Study in the Administration Section of the Batu City Regional Secretariat), Supervisor I: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M, Advisor II: Dr. Didik Supriyanto, S. Sos., ST., M.Si

---

This thesis is the result of research that describes the evaluation of *e-lppd* policies in the world of government in the Government Section of the Regional Secretariat of Batu City. The presence of the *e-lppd* policy in the world of government in Indonesia is a strategic step for the government in creating an effective, transparent and accountable government. With the emergence of the *e-lppd* which is based on Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2020 concerning Electronic Regional Government Implementation Reports, the process of preparing reports on the implementation of regional government is not only carried out in the conventional way or by coming directly to government offices.

The results obtained show that, in the implementation of *e-lppd*, it does not always go well, as happened in the Government Section of the Regional Secretariat of Batu City. There are several points in this policy that can be evaluated for improvement in the implementation of this policy in the future. As is the case with the process of preparing reports electronically which has not been maximized due to shifts in officials during the inauguration, so these officials do not know so they start from zero again. And regarding whether this policy has been running effectively as stated in the Minister of Home Affairs Regulation concerning the implementation of preparing reports on the administration of regional government in an efficient, transparent and accountable manner, this *e-lppd* policy is able to comply with existing regulations.

Through the evaluation process that has been carried out, several recommendations and suggestions were found that the researcher could provide, namely by optimizing the socialization process at the Batu City SKPD so that the presence of this *e-lppd* is better known and its use can be maximized by the Batu City SKPD. Besides that, optimizing training in filling out reports is also one of the suggestions so that the SKPD in Batu City does not have difficulty filling in.

**Keywords:** *Evaluation, E-Lppd, Regional Secretariat Government Section*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi di bidang administrasi yang terjadi hingga hari ini menjadi alat dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan dalam perkembangan arus globalisasi, termasuk juga untuk kebutuhan memperlancar pekerjaan pelayanan administrasi di pemerintahan. Dalam arus globalisasi kita sebagai tuan bukan sebagai hamba yang diperbudak oleh globalisasi, sekiranya dapat mengendalikan globalisasi secara baik dengan mempertajam dan mengembangkan nilai etik moral dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Dwiyanto (2011:181) mengatakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan kinerja dalam mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya sebuah aplikasi akan sangat mempermudah pelayanan administrasi yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yang selanjutnya disebut dengan *E-Government* (pemerintahan elektronik).

Peningkatan *e-government* berkaitan erat dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan efisien. Untuk konteks pemerintahan saat ini, penyelenggaraan *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik menggunakan sistem informasi manajemen. Dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar pengembangan *e-government* yaitu untuk meningkatkan jangkauan pemerintah dan masyarakat melalui informasi proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

Menurut Ackof (dalam Effendy, 1989: 51) Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang tepat guna memberikan kemudahan dalam proses manajemen. Implementasi dari pengembangan SIM dapat dilihat dari proses pengembangan, biaya pengembangan, kegunaan dan fitur yang disediakan oleh SIM, sistem aplikasi pendukung, dan keterintegrasian sistem. Terintegrasian sistem informasi menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan publik agar tercapai secara kesinambungan. Oleh karena itu, dengan pengembangan sistem informasi manajemen melalui aplikasi berbasis online ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dari waktu ke waktu.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik, dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahannya untuk memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih

banyak pada tatanan pelaksanaan otonomi tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi dimana laporan yang dimaksud salah satunya yaitu LPPD.

Dalam perkembangannya, proses penyusunan LPPD oleh pemerintah daerah tidak hanya dilaksanakan secara manual yaitu mengirimkan bahan-bahan penyusunan LPPD secara langsung dengan datang di kantor pemerintahan akan tetapi juga bisa dilaksanakan secara *online*. Tentunya hal ini didasari dengan perkembangan dalam teknologi dan komunikasi yang sangat pesat sehingga pemerintah daerah akan dimudahkan dengan sistem tersebut. Seperti halnya Pemerintah Kota Batu melalui Peraturan Walikota (Perwali) Pasal 12 No. 82 Tahun 2021 yang telah menerapkan penyampaian LPPD melalui sistem informasi pemerintah daerah.

Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat apabila dikaitkan dengan permasalahan di atas, pemanfaatan teknologi digital dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi sebuah terobosan yang dinamakan sistem *e-lppd* merupakan keniscayaan yang harus dibangun sehingga diharapkan mampu menjadi solusi alternatif guna meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batu.

Tabel 1.1

Kriteria Keberhasilan *E-LPPD* Kota Batu

Indikator Keberhasilan	Target Capaian Kinerja	Bobot Target
Terwujudnya <i>Electronic</i> – Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( <i>E-LLPD</i> )	100%	50%
Meningkatkan Efisiensi Proses Penyampaian Data Lppd dari SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Batu.	100%	50%

Sumber: Rahmadanti, 2022

Pada dasarnya *e-lppd* merupakan sistem yang dibuat pemerintah pusat untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2020 karena seringkali dalam pelaporan secara manual terdapat hambatan dan kurang efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan pembaharuan sistem yang bisa mengatasi kendala dan hambatan pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat kecanggihan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, maka diperlukan suatu inovasi baru yang merupakan kombinasi dengan teknologi saat ini.

Landasan pelaksanaan *e-lppd* ialah pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwasannya penyediaan sistem informasi elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi secara *online*. Melalui teknologi informasi

dan komunikasi, *e-lppd* ini mampu diinovasikan untuk mempermudah SKPD dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kemudian untuk dokumentasi-dokumentasi data pendukung dari setiap elemen data capaian kinerja secara online. Dengan terobosan baru melalui inovasi *e-lppd* ini mampu memberikan kelebihan disiplin waktu dan data pendukung.

Kebijakan mengenai *e-lppd* masih memiliki beberapa kendala atau hambatan. Teknologi informasi pada dasarnya membutuhkan jaringan internet dalam penggunaannya masih belum dijangkau semua wilayah. Tidak hanya itu, karyawan SKPD yang menggunakan juga masih tidak faham akan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perbaikan dengan melihat bagaimana program ini berjalan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada atau evaluasi mengenai *e-lppd* dibutuhkan agar *e-lppd* dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Anderson, 1975 (Alamsyah, 2016: 104) menjelaskan secara sederhana mengenai definisi evaluasi kebijakan publik yaitu:

“evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan publik yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan publik. Lebih jelas lagi bahwa evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan publik tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan publik berlangsung.”

Jika dikaitkan dengan penerapan kebijakan *e-lppd* sejak tahun 2019, maka proses evaluasi dari adanya sistem ini untuk mengetahui seberapa baik sistem ini berjalan. Mengingat usia penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu telah memasuki usia 3 tahun, maka sudah sewajarnya untuk dilakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini dikarenakan selain amanat konstitusi, juga merupakan bagian dari proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa LPPD merupakan salah satu bahan pembinaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembinaan ini menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah, mengingat struktur dan bentuk pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Batu berupa penentuan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi, kontrol dan pemberdayaan agar pemerintah daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Di sisi lain, LPPD merupakan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, idealnya memberikan gambaran secara menyeluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu.

Selanjutnya dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu, diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD ini dijumpai beberapa permasalahan diantaranya :

1. Dalam penyusunan LPPD masih bersifat manual lambat.

Pada saat dilakukan pengiriman dan pengarsipan arsip data pendukung tidak teratur dan terlihat sulit dicari saat diperlukan

(arsip/*hardcopy* memerlukan banyak ruang). Adapun yang terkesan lambat karena terlalu banyak membutuhkan tenaga untuk jemput bola ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ketika mengarsipkan bahan-bahan LPPD masih terlihat menggunakan manual dengan cara memasukkan kedalam Map yang bisa saja mudah sekali terjadinya kehilangan. Tak hanya itu, sulitnya para pegawai dalam mengelola bahan-bahan LPPD yang masih menggunakan sistem manual (MsWord).

2. Dalam Penyampaian Data SKPD sering mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data sehingga tidak efisien.

Penggambaran perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan kelengkapan data berupa laporan dan data pendukung dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu, akan tetapi sering terjadi permasalahan yang dihadapi seperti keterlambatan SKPD dalam penyampaian data capaian kinerja. Jadi proses pengolahan data di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu juga terlambat dan tidak efisien.

Evaluasi sistem *e-lppd* di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistemnya. Evaluasi ini juga dipergunakan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang terjadi pada runtutan pemerintahan melalui sistem *e-lppd* sehingga jika nantinya ditemukan permasalahan-permasalahan maka akan ditemukan dan dipergunakan pada kebijakan perbaikan sistem *e-lppd*. Evaluasi sistem *e-lppd* ini berdasarkan penilaian akan efisiensi Pemerintah Kota Batu dalam

menyusun dan penyampaian LPPD melalui sistem informasi berbasis elektronik tersebut kepada pemerintah pusat. Apakah lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah dibandingkan dengan metode manual menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik program ini berjalan.

Berdasarkan perkembangan teknologi yang begitu pesat apabila dikaitkan dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan evaluasi penerapan sistem aplikasi *e-lppd* dengan harapan untuk memberikan sumbangsih baik secara keilmuan maupun praktek dengan harapan mampu menjadikan aplikasi sistem *e-lppd* sebagai solusi alternatif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sehingga dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengurus penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari judul yang di angkat oleh peneliti “**Evaluasi Kebijakan *Electronic* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu)**”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis evaluasi kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengevaluasi kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
- c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu terdapat beberapa hambatan dan juga kemudahan. Kebijakan *e-lppd* sudah memiliki rancangan yang diharapkan atau diinginkan dapat memberikan kemudahan terhadap penyusunan LPPD Kota Batu, namun masih mengalami beberapa masalah baik secara sistem terkadang trial dan error ataupun SDM nya. Hal ini jelas akan memberikan dampak terhadap jalannya penyusunan *e-lppd* menjadi terhambat dan standart pelayanan publik yang mudah dan cepat tidak terealisasi dengan baik seperti yang diharapkan sehingga pengisian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *e-lppd* kurang optimal.

Permasalahan selanjutnya ialah minimnya pengetahuan SKPD terkait adanya terobosan baru di dunia pemerintahan yakni *e-lppd*. Sedangkan SKPD mempunyai peran penting sukseki *e-lppd* dalam melengkapi data dan menggambarkan perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis ditemukan alasan bahwasannya keterlambatan data yang diterimanya melalui *e-lppd* didasari minimnya pengetahuan tentang teknologi pengguna SKPD Kota Batu seperti pada mekanisme pengisian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *e-lppd* dan minimnya SKPD yang mengetahui akan kehadiran *e-lppd*

dikarenakan kurang optimalnya proses sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada dasarnya *e-lppd* adalah terobosan penyampaian laporan dapat menjadi lebih cepat dan melalui sistem aplikasinya keamanan data dapat lebih terjamin. Sehingga dengan permasalahan yang ada peneliti merekomendasikan perlu adanya perbaikan baik dari sisi sosialisasi untuk memasifkan pemahaman *e-lppd* kepada SKPD dan penguatan pemahaman tentang teknologi dalam mencapai proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *e-lppd* secara lebih baik lagi.

## 5.2 Saran

Setelah proses evaluasi pada kebijakan *electronic* laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu, diharapkan adanya perbaikan untuk memperbaiki beberapa masalah yang muncul pada saat mengurus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan dengan adanya evaluasi serta perbaikan ini akan memberikan operasional yang baik untuk selanjutnya pada proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.

Adapun saran-saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan sistem *e-lppd* di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu ialah sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat lebih menggali teori-teori yang relevan untuk dipakai dalam penelitian, khususnya tentang Evaluasi Kebijakan *Electronic* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batu.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperluas subjek ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar mampu melihat evaluasi dari pusat yang lebih mendalam terkait sistem informasi yang diberikan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor atau penyebab lain dari penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem *e-lppd* dan mampu membuat hasil yang lebih baik dibanding hasil pada penelitian ini.

### 5.2.2 Saran praktis

1. Mengoptimalkan proses sosialisasi yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu kepada SKPD Kota Batu. Proses sosialisasi bisa dilaksanakan dengan seluruh SKPD Pemerintahan Kota Batu melalui kerjasama dengan seluruh tim pelaksana *e-lppd*. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini mampu memberikan *treatment* lebih dalam mekanisme pengisian atau mengolah data yang akan dilaporkan ke dalam *e-lppd* serta updating terbaru dari Kemendagri terkait format IKK yang disusun tahun depan.
2. Pada hambatan pada pelaksanaan *e-lppd*, mengenai SKPD Kota Batu yang harus mengurus LPPD dengan datang langsung ke kantor Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu diharapkan dapat lebih memaksimalkan teknologi yang ada.

3. Membangun jaringan internet lebih luas untuk menampung lonjakan user, sehingga pada saat digunakan secara bersamaan tidak terjadi sebuah masalah dalam mengakses sistem *e-lppd*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AG. Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Akbar, Muh. Firyal. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Arikunto, S. 2002. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Assar S, Boughzala I dan Boydens I. 2011. *Back to Practice, a Decade of Research in E-Government, in "Practical Studies in E-Government: Best Practice from around the world"*, Eds. New York, USA: Springer
- B Miles, Matter, Huberman dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Brinkerhoff, R. O. 1983. *Program Evaluation A Practitioner's Guide For Trainers and Educators*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Dwiyanto, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Dramedia Pustaka.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lester, James P and Stewart Jr, Joseph. 200. *Public Policy An Evolutionary Approach, Second edition*. Belmont: Wadsworth Thomas Learning.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Darmawan, Muhammad Ridwan Lubis, Erika Revida, Surya Hendra Putra, Syifa Saputra, Jamaludin, Edi Surya Negara dan Janner Simarmata.

2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Royandiah, D. I. 2004. *Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Bentuk Laporan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Siagian. Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung: Falah Production.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Supriyanto, Didik dan Sigit Wahyudi. 2020. *Formulasi Kebijakan Publik*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Taufiqurokhman, 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Tayibnapis, 2008. *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Rineka Cipta. Jakarta.

Utama, Yos Johan. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses an Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Jurnal:**

Alkin, Marvin C. 1969. Evaluation Theory Development, UCLA CSE Evaluation Comment, Center For The Study of Evaluation, Vol.2, No.1, University of California, Los Angeles.

- Aviandani, Kikik, Yaqub Cikusin, dan Sunariyanto. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 16, No. 6, Tahun 2022, Hal: 43-52.
- Habibullah, Achmad. 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 23, No. 3
- Momuat, Henry Nelson, Jetty E.H Mokat dan Fitri H. Mamonto. 2020. Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Sekeretaryat Daerah Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 9, No. 1
- Ningtias, Rahmadanti Ayu. 2022. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Melalui Aplikasi E-LPPD Kota Batu. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Samsudin, Riskytullah Putra. 2022. Keefektivan e-LPPD Dalam Penyediaan Informasi SIPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah.
- Siswadi, Arif. 2019. *Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi Kalimantan Utara*. Masters thesis: Universitas Terbuka.
- Supriyanto, D. Analysis Of The Quality Of Population Administration And Civil Registration Services In Bareng Village, Klojen District, Malang City.
- Suwito, Heru Puji. 2022. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Asdaf Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Elektronik Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F tentang Hak Berkomunikasi

**Website:**

Badan Pusat Statistik Kota Batu. <https://batukota.bps.go.id/> , diakses pada 30 November 2022

Website Resmi Kota Batu. <https://batukota.go.id/> , diakses pada 30 November 2022

